

### MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Gubernur.

2. Bupati/Walikota.

di -

Seluruh Indonesia.

#### SURAT EDARAN

NOMOR 000.9.3.4/9305/SJ

#### **TENTANG**

## EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN PENGADUAN OLEH PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik, salah satunya dalam hal pengelolaan pengaduan. Sehubungan dengan itu, disampaikan hasil evaluasi kinerja pengelolaan pengaduan oleh pemerintah daerah tahun 2024, yang dinilai dengan berpedoman pada Instrumen Evaluasi Kinerja Pengelolaan Pengaduan, sebagai berikut:

- 1. Terdapat 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) atau 62% (enam puluh dua persen) pemerintah daerah yang mengikuti evaluasi, dengan predikat kinerja:
  - a. Sangat baik, sebanyak 3 (tiga) Provinsi, 2 (dua) Kabupaten, dan 3 (tiga) Kota;
  - b. Baik, sebanyak 13 (tiga belas) Provinsi, 40 (empat puluh) Kabupaten, dan 23 (dua puluh tiga) Kota;
  - c. Sedang, sebanyak 11 (sebelas) Provinsi, 143 (seratus empat puluh tiga) Kabupaten, dan 34 (tiga puluh empat) Kota; dan
  - d. Kurang, sebanyak 2 (dua) Provinsi, 55 (lima puluh lima) Kabupaten, dan 9 (sembilan) Kota.
  - sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- 2. Terdapat 208 (dua ratus delapan) atau 38% (tiga puluh delapan persen) pemerintah daerah yang tidak mengikuti evaluasi, sehingga kinerja pengelolaan pengaduan tidak dapat dinilai.

- 3. Beberapa permasalahan pengelolaan pengaduan pada 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) pemerintah daerah yang mengikuti evaluasi antara lain:
  - a. Masih rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan pengaduan:
    - Baru 12% (dua belas persen) kepala daerah yang menetapkan tim pengelola pengaduan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
    - Rata-rata alokasi anggaran pengelolaan pengaduan dibawah 1% (satu persen) dari total anggaran dinas komunikasi dan informatika.
  - b. Kurangnya pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah:
    - Hanya 53% (lima puluh tiga persen) kepala daerah yang melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan secara internal.
    - Hanya 48% (empat puluh delapan persen) pejabat pengelola pengaduan yang menyampaikan rekomendasi perbaikan kebijakan pelayanan publik kepada kepala daerah.
  - c. Masih rendahnya kualitas tindak lanjut penyelesaian pengaduan:
    - Baru 41% (empat puluh satu persen) pemerintah daerah yang kualitas tanggapan pengaduan sangat baik dan baik.
  - d. Masih rendahnya jumlah kebijakan yang dihasilkan berdasarkan data pengaduan dan tingkat kepuasan masyarakat pengguna LAPOR!:
    - Hanya 45% (empat puluh lima persen) pemerintah daerah yang memanfaatkan data pengaduan untuk perbaikan kebijakan pelayanan publik.
    - Rating kepuasan pengguna LAPOR! masih dibawah 3 (tiga) dari skala 1 s.d. 5 (satu sampai dengan lima).
  - e. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah:
    - Baru 35% (tiga puluh lima persen) pemerintah daerah yang mendapatkan indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah dengan predikat sangat memuaskan dan memuaskan.
- 4. Gubernur dan Bupati/Walikota agar segera melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Menetapkan tim pengelola pengaduan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan mengalokasikan anggaran pengelolaan pengaduan secara memadai;
  - b. Mendorong optimalisasi pemanfaatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Layanan Aplikasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!);
  - c. Meningkatkan kualitas tindak lanjut penyelesaian pengaduan melalui peningkatan kapabilitas aparatur pengelola pengaduan;

- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan di masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- e. Memanfaatkan data pengaduan untuk perbaikan kebijakan pelayanan publik; dan
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Menteri Dalam Negeri melalui Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (082220002138).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2025

Menteri Malam Negeri,

Muhammad Tito Karnavian

#### Tembusan Yth.:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
- 4. Menteri Komunikasi dan Digital;
- 5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 6. Kepala Staf Kepresidenan; dan
- 7. Ketua Ombudsman Republik Indonesia.

LAMPIRAN
SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR
TENTANG
EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN
PENGADUAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

## HASIL EVALUASI PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

### A. HASIL EVALUASI PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
1	Provinsi Aceh	Baik	
2	Provinsi Sumatera Utara	Baik	
3	Provinsi Sumatera Barat	Baik	<ul> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> </ul>
4	Provinsi Sumatera Selatan	Baik	
5	Provinsi Riau	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> <li>Meningkatkan kinerja pengelola pengaduan</li> </ul>
6	Provinsi Kepulauan Riau	Sedang	<ul> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
7	Provinsi Jambi	Kurang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> </ul>

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
			<ul> <li>Memperkuat diseminasi</li> <li>pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data</li> <li>pengaduan dalam</li> <li>meningkatkan layanan publik</li> </ul>
8	Provinsi Bengkulu	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen         pimpinan dalam pengelolaan         pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi         pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi         pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data         pengaduan dalam         meningkatkan layanan publik</li> </ul>
9	Provinsi Bangka Belitung		TIDAK DINILAI
10	Provinsi Lampung		TIDAK DINILAI
11	Provinsi Banten	Baik	<ul> <li>Menguatkan kompetensi</li> <li>pengelola pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data</li> <li>pengaduan dalam</li> <li>meningkatkan layanan publik</li> </ul>
12	Provinsi Jawa Barat	Baik	
13	Provinsi Jawa Tengah	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen</li> <li>pimpinan dalam pengelolaan</li> <li>pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi</li> <li>pengelolaan pengaduan</li> </ul>
14	Provinsi Jawa Timur	Sangat Baik	
15	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Baik	
16	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Sangat Baik	
17	Provinsi Bali	Baik	- Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Baik	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> </ul>

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
19	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
20	Provinsi Kalimantan Barat	Sedang	<ul> <li>Memanfaatkan data</li> <li>pengaduan dalam</li> <li>meningkatkan layanan publik</li> </ul>
21	Provinsi Kalimantan Selatan	Sangat Baik	
22	Provinsi Kalimantan Tengah	Baik	
23	Provinsi Kalimantan Timur	Baik	
24	Provinsi Kalimantan Utara	Baik	
25	Provinsi Gorontalo	Sedang	<ul> <li>Memanfaatkan data</li> <li>pengaduan dalam</li> <li>meningkatkan layanan publik</li> </ul>
26	Provinsi Sulawesi Selatan	Baik	<ul> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> </ul>
27	Provinsi Sulawesi Tenggara	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
28	Provinsi Sulawesi Tengah	Sedang	<ul> <li>Memperkuat diseminasi</li> <li>pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data</li> <li>pengaduan dalam</li> <li>meningkatkan layanan publik</li> <li>Meningkatkan kinerja</li> <li>pengelola pengaduan</li> </ul>
29	Provinsi Sulawesi Utara		TIDAK DINILAI

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
30	Provinsi Sulawesi Barat	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> </ul>
31	Provinsi Maluku	Kurang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> <li>Meningkatkan kinerja pengelolaan pengaduan</li> </ul>
32	Provinsi Maluku Utara		TIDAK DINILAI
33	Provinsi Papua		TIDAK DINILAI
34	Provinsi Papua Barat	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
35	Provinsi Papua Selatan		TIDAK DINILAI
36	Provinsi Papua Tengah		TIDAK DINILAI
37	Provinsi Papua Pegunungan		TIDAK DINILAI
38	Provinsi Papua Barat Daya		TIDAK DINILAI

# B. HASIL EVALUASI PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI SETIAP PROVINSI

## 1) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
1	Kabupaten Aceh Barat	Sedang	<ul> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
2	Kabupaten Aceh Barat Daya	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen</li> <li>pimpinan dalam pengelolaan</li> <li>pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi</li> <li>pengelolaan pengaduan</li> </ul>
3	Kabupaten Aceh Besar		TIDAK DINILAI
4	Kabupaten Aceh Jaya	Kurang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> <li>Meningkatkan kinerja pengelola pengaduan</li> </ul>
5	Kabupaten Aceh Selatan		TIDAK DINILAI
6	Kabupaten Aceh Singkil	Sedang	<ul> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
7	Kabupaten Aceh Tamiang	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen         pimpinan dalam pengelolaan         pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi         pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi         pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data         pengaduan dalam         meningkatkan layanan publik</li> </ul>
8	Kabupaten Aceh Tengah	Baik	- Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan
9	Kabupaten Aceh Tenggara	Kurang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> <li>Meningkatkan kinerja pengelola pengaduan</li> </ul>
10	Kabupaten Aceh Timur	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> </ul>
11	Kabupaten Aceh Utara	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> </ul>

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
12	Kabupaten Bener Meriah	Kurang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> <li>Meningkatkan kinerja pengelola pengaduan</li> </ul>
13	Kabupaten Bireuen	Kurang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> <li>Meningkatkan kinerja pengelola pengaduan</li> </ul>
14	Kabupaten Gayo Lues	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> </ul>
15	Kabupaten Nagan Raya		TIDAK DINILAI
16	Kabupaten Pidie	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
17	Kabupaten Pidie Jaya	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen</li> <li>pimpinan dalam pengelolaan</li> <li>pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi</li> <li>pengelolaan pengaduan</li> </ul>
18	Kabupaten Simeulue		TIDAK DINILAI
19	Kota Banda Aceh	Sangat Baik	
20	Kota Langsa	Sedang	<ul> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
21	Kota Lhokseumawe	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
22	Kota Sabang	Baik	<ul> <li>Memperkuat diseminasi</li> <li>pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data</li> <li>pengaduan dalam</li> <li>meningkatkan layanan publik</li> </ul>
23	Kota Subulussalam	Kurang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> <li>Meningkatkan kinerja pengelola pengaduan</li> </ul>

# 2) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
1	Kabupaten Asahan	Kurang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
2	Kabupaten Batu Bara	Kurang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
3	Kabupaten Dairi	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
4	Kabupaten Deli Serdang	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
5	Kabupaten Humbang Hasundutan	Kurang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> <li>Meningkatkan kinerja pengelola pengaduan</li> </ul>
6	Kabupaten Karo	Baik	
7	Kabupaten Labuhanbatu	Kurang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> <li>Meningkatkan kinerja pengelola pengaduan</li> </ul>
8	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Kurang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> <li>Meningkatkan kinerja pengelola pengaduan</li> </ul>

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
9	Kabupaten Labuhanbatu Utara	Kurang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
10	Kabupaten Langkat	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen         pimpinan dalam pengelolaan         pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi         pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data         pengaduan dalam         meningkatkan layanan publik</li> </ul>
11	Kabupaten Mandailing Natal		TIDAK DINILAI
12	Kabupaten Nias	Kurang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> <li>Meningkatkan kinerja pengelola pengaduan</li> </ul>

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
13	Kabupaten Nias Barat	Kurang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
14	Kabupaten Nias Selatan	Kurang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
15	Kabupaten Nias Utara	Kurang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
16	Kabupaten Padang Lawas	Kurang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> <li>Meningkatkan kinerja pengelola pengaduan</li> </ul>

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
17	Kabupaten Padang Lawas Utara	Kurang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
18	Kabupaten Pakpak Bharat	Kurang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
19	Kabupaten Samosir	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen         pimpinan dalam pengelolaan         pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi         pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi         pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data         pengaduan dalam         meningkatkan layanan publik</li> </ul>
20	Kabupaten Serdang Bedagai	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> </ul>

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
21	Kabupaten Simalungun	Sedang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan kinerja pengelola pengaduan</li> </ul>
22	Kabupaten Tapanuli Selatan	Kurang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
23	Kabupaten Tap <mark>anuli Teng</mark> ah	Kurang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> <li>Meningkatkan kinerja pengelola pengaduan</li> </ul>
24	Kabupaten Tapanuli Utara	Kurang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> </ul>

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
			<ul> <li>Memperkuat diseminasi</li> <li>pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data</li> <li>pengaduan dalam</li> <li>meningkatkan layanan publik</li> </ul>
25	Kabupaten Toba	Kurang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> <li>Meningkatkan kinerja pengelola pengaduan</li> </ul>
26	Kota Binjai	Sedang	<ul> <li>Memperkuat diseminasi</li> <li>pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data</li> <li>pengaduan dalam</li> <li>meningkatkan layanan publik</li> </ul>
27	Kota Gunungsitoli		TIDAK DINILAI
28	Kota Medan	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
29	Kota Padangsidimpuan	Kurang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
30	Kota Pematangsiantar	Kurang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
31	Kota Sibolga	Kurang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
32	Kota Tanjungbalai		TIDAK DINILAI
33	Kota Tebing Tinggi	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> </ul>

# 3) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
1	Kabupaten Agam		TIDAK DINILAI
2	Kabupaten Dharmasraya	Kurang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
3	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Kurang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
4	Kabupaten Lima Puluh Kota	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
5	Kabupaten Padang Pariaman		TIDAK DINILAI
6	Kabupaten Pasaman		TIDAK DINILAI

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
7	Kabupaten Pasaman Barat	Kurang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen         pimpinan dalam pengelolaan         pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi         pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi         pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data         pengaduan dalam         meningkatkan layanan publik</li> <li>Meningkatkan kinerja         pengelola pengaduan</li> </ul>
8	Kabupaten Pesisir Selatan	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
9	Kabupaten Sijunjung		TIDAK DINILAI
10	Kabupaten Solok		TIDAK DINILAI
11	Kabupaten Solok Selatan		TIDAK DINILAI
12	Kabupaten Tanah Datar	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
13	Kota Bukittinggi	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
14	Kota Padang	Baik	- Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan
15	Kota Padang Panjang	Sedang	- Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan
16	Kota Pariaman	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
17	Kota Payakumbuh	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
18	Kota Sawahlunto	Sedang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan Mem</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
19	Kota Solok	Baik	<ul> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>

# 4) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
1	Kabupaten Banyuasin		TIDAK DINILAI
2	Kabupaten Empat Lawang	Kurang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> <li>Meningkatkan kinerja pengelola pengaduan</li> </ul>
3	Kabupaten Lahat	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> </ul>
4	Kabupaten Muara Enim	Baik	<ul> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> </ul>
5	Kabupaten Musi Banyuasin	Kurang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> <li>Meningkatkan kinerja pengelola pengaduan</li> </ul>
6	Kabupaten Musi Rawas	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen</li> <li>pimpinan dalam pengelolaan</li> <li>pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi</li> <li>pengelolaan pengaduan</li> </ul>

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
7	Kabupaten Musi Rawas Utara	Kurang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
8	Kabupaten Ogan Ilir		TIDAK DINILAI
9	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Baik	- Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan
10	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen</li> <li>pimpinan dalam pengelolaan</li> <li>pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi</li> <li>pengelolaan pengaduan</li> </ul>
11	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Kurang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> <li>Meningkatkan kinerja pengelola pengaduan</li> </ul>
12	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen         pimpinan dalam pengelolaan         pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi         pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi         pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data         pengaduan dalam         meningkatkan layanan publik</li> </ul>
13	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Baik	- Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
14	Kota Lubuk Linggau	Kurang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
15	Kota Pagar Alam	Kurang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> <li>Meningkatkan kinerja pengelola pengaduan</li> </ul>
16	Kota Palembang	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen         pimpinan dalam pengelolaan         pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi         pengelolaan pengaduan</li> </ul>
17	Kota Prabumulih	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen         pimpinan dalam pengelolaan         pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi         pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi         pengelolaan pengaduan</li> </ul>

# 5) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
1	Kabupaten Bengkalis	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen         pimpinan dalam pengelolaan         pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi         pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi         pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data         pengaduan dalam         meningkatkan layanan publik</li> </ul>
2	Kabupaten Indragiri Hilir	Kurang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
3	Kabupaten Indragiri Hulu		TIDAK DINILAI
4	Kabupaten Kampar	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> </ul>
5	Kabupaten Kepulauan Meranti		TIDAK DINILAI
6	Kabupaten Kuantan Singingi	Baik	<ul> <li>Memperkuat diseminasi</li> <li>pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data</li> <li>pengaduan dalam</li> <li>meningkatkan layanan publik</li> </ul>
7	Kabupaten Pelalawan		TIDAK DINILAI
8	Kabupaten Rokan Hilir		TIDAK DINILAI
9	Kabupaten Rokan Hulu		TIDAK DINILAI
10	Kabupaten Siak	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
11	Kota Dumai	Baik	- Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan
12	Kota Pekanbaru	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen         pimpinan dalam pengelolaan         pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi         pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi         pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data         pengaduan dalam         meningkatkan layanan publik</li> </ul>

# 6) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
1	Kabupaten Bintan	Baik	<ul> <li>Memperkuat diseminasi</li> <li>pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data</li> <li>pengaduan dalam</li> <li>meningkatkan layanan publik</li> </ul>
2	Kabupaten Karimun	Sedang	<ul> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> </ul>
3	Kabupaten Kepulauan Anambas	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
4	Kabupaten Lingga	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
5	Kabupaten Natuna	Baik	<ul> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> </ul>
6	Kota Batam	Baik	<ul> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
7	Kota Tanjungpinang	Kurang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>

# 7) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAMBI

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
1	Kabupaten Batanghari	TIDAK DINILAI	
2	Kabupaten Bungo		TIDAK DINILAI
3	Kabupaten Kerinci		TIDAK DINILAI
4	Kabupaten Merangin		TIDAK DINILAI
5	Kabupaten Muaro Jambi		TIDAK DINILAI
6	Kabupaten Sarolangun		TIDAK DINILAI
7	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
8	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
9	Kabupaten Tebo	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
10	Kota Jambi		TIDAK DINILAI
11	Kota Sungai Penuh		TIDAK DINILAI

# 8) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BENGKULU

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
1	Kabupaten Bengkulu Selatan		TIDAK DINILAI
2	Kabupaten Bengkulu Tengah	Sedang	- Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan
3	Kabupaten Bengkulu Utara	Kurang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> <li>Meningkatkan kinerja pengelola pengaduan</li> </ul>
4	Kabupaten Kaur		TIDAK DINILAI
5	Kabupaten Kepahiang	Kurang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
6	Kabupaten Lebong		TIDAK DINILAI
7	Kabupaten Mukomuko		TIDAK DINILAI
8	Kabupaten Rejang Lebong	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
9	Kabupaten Seluma		TIDAK DINILAI

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
10 Ko	ta Bengkulu	Kurang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>

# 9) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANGKA BELITUNG

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
1	Kabupaten Bangka	Sedang	<ul><li>Menguatkan kompetensi</li><li>pengelola pengaduan</li><li>Memperkuat diseminasi</li><li>pengelolaan pengaduan</li></ul>
2	Kabupaten Bangka Barat		TIDAK DINILAI
3	Kabupaten Bangka Selatan		TIDAK DINILAI
4	Kabupaten Bangka Tengah	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> <li>Meningkatkan kinerja pengelola pengaduan</li> </ul>
5	Kabupaten Belitung	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> <li>Meningkatkan kinerja pengelola pengaduan</li> </ul>
6	Kabupaten Belitung Timur	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
7	Kota Pangkal Pinang		TIDAK DINILAI

# 10) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
1	Kabupaten Lampung Tengah	TIDAK DINILAI	
2	Kabupaten Lampung Utara		TIDAK DINILAI
3	Kabupaten Lampung Selatan	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
4	Kabupaten Lampung Barat	A	TIDAK DINILAI
5	Kabupaten Lampung Timur	Kurang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> <li>Meningkatkan kinerja pengelola pengaduan</li> </ul>
6	Kabupaten Mesuji		TIDAK DINILAI
7	Kabupaten Pesawaran	Kurang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan kinerja pengelola pengaduan</li> </ul>
8	Kabupaten Pesisir Barat		TIDAK DINILAI
9	Kabupaten Pringsewu		TIDAK DINILAI
10	Kabupaten Tulang Bawang		TIDAK DINILAI

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
11	Kabupaten Tulang Bawang Barat	Sedang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
12	Kabupaten Tanggamus		TIDAK DINILAI
13	Kabupaten Way Kanan		TIDAK DINILAI
14	Kota Bandar Lampung		TIDAK DINILAI
15	Kota Metro	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>

# 11) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
1	Kabupaten Lebak	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen         pimpinan dalam pengelolaan         pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi         pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi         pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data         pengaduan dalam         meningkatkan layanan publik</li> </ul>
2	Kabupaten Pandeglang	Sedang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
3	Kabupaten Serang		TIDAK DINILAI
4	Kabupaten Tangerang	Sangat Baik	
5	Kota Cilegon	Kurang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
6	Kota Serang		TIDAK DINILAI
7	Kota Tangerang	Baik	

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
8	Kota Tangerang Selatan	Sedang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>

## 12) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
1	Kabupaten Bandung	Baik	
2	Kabupaten Bandung Barat		TIDAK DINILAI
3	Kabupaten Bekasi	Sedang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
4	Kabupaten Bogor	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
5	Kabupaten Ciamis	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen         pimpinan dalam pengelolaan         pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi         pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi         pengelolaan pengaduan</li> </ul>
6	Kabupaten Cianjur	Sedang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
7	Kabupaten Cirebon	Sedang	<ul> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
8	Kabupaten Garut	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
9	Kabupaten Indramayu	Sedang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
10	Kabupaten Karawang	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> </ul>
11	Kabupaten Kuningan		TIDAK DINILAI

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
12	Kabupaten Majalengka	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
13	Kabupaten Pangandaran	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> </ul>
14	Kabupaten Purwakarta	Baik	- Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan
15	Kabupaten Subang	Sedang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
16	Kabupaten Sukabumi	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
17	Kabupaten Sumedang	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
18	Kabupaten Tasikmalaya		TIDAK DINILAI
19	Kota Bandung	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> </ul>
20	Kota Banjar	Baik	<ul> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> </ul>
21	Kota Bekasi		TIDAK DINILAI
22	Kota Bogor	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
23	Kota Cimahi	Baik	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> </ul>
24	Kota Cirebon	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> </ul>
25	Kota Depok	Baik	- Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan
26	Kota Sukabumi		TIDAK DINILAI
27	Kota Tasikmalaya	Baik	

#### 13) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
1	Kabupaten Banjarnegara	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
2	Kabupaten Banyumas	Baik	<ul> <li>Meningkatkan komitmen</li> <li>pimpinan dalam pengelolaan</li> <li>pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi</li> <li>pengelola pengaduan</li> </ul>
3	Kabupaten Batang		TIDAK DINILAI
4	Kabupaten Blora	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
5	Kabupaten Boyolali	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
6	Kabupaten Brebes	Kurang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> </ul>

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
			<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
7	Kabupaten Cilacap	Kurang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> <li>Meningkatkan kinerja pengelola pengaduan</li> </ul>
8	Kabupaten Demak	Baik	<ul> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
9	Kabupaten Grobogan	Sedang	<ul> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> </ul>
10	Kabupaten Jepara	Sedang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
11	Kabupaten Karanganyar	Sedang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> </ul>
12	Kabupaten Kebumen	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
13	Kabupaten Kendal	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen         pimpinan dalam pengelolaan         pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi         pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi         pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data         pengaduan dalam         meningkatkan layanan publik</li> </ul>
14	Kabupaten Klaten	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen         pimpinan dalam pengelolaan         pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi         pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data         pengaduan dalam         meningkatkan layanan publik</li> </ul>
15	Kabupaten Kudus	Sedang	<ul><li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li><li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li></ul>

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
16	Kabupaten Magelang	Kurang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
17	Kabupaten Pati	Kurang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> <li>Meningkatkan kinerja pengelola pengaduan</li> </ul>
18	Kabupaten Pekalongan	Kurang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
19	Kabupaten Pemalang	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> <li>Meningkatkan kinerja pengelola pengaduan</li> </ul>
20	Kabupaten Purbalingga	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> </ul>
21	Kabupaten Purworejo	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> </ul>
22	Kabupaten Rembang	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengadua</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> </ul>
23	Kabupaten Semarang	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen         pimpinan dalam pengelolaan         pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi         pengelola pengaduan         Memperkuat diseminasi         pengelolaan pengaduan</li> </ul>

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
24	Kabupaten Sragen	Sedang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
25	Kabupaten Sukoharjo	Kurang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
26	Kabupaten Tegal	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
27	Kabupaten Temanggung	Kurang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
28	Kabupaten Won <mark>o</mark> giri	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen</li> <li>pimpinan dalam pengelolaan</li> <li>pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi</li> <li>pengelola pengaduan</li> </ul>
29	Kabupaten Wonosobo	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> </ul>
30	Kota Magelang	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
31	Kota Pekalongan	Baik	<ul> <li>- Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> </ul>
32	Kota Salatiga	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> </ul>
33	Kota Semarang	Baik	
34	Kota Surakarta	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
35	Kota Tegal	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> </ul>

## 14) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
1	Kabupaten Bangkalan	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
2	Kabupaten Banyuwangi	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> </ul>
3	Kabupaten Blitar	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
4	Kabupaten Bojonegoro	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
5	Kabupaten Bondowoso	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
6	Kabupaten Gresik	Baik	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> </ul>
7	Kabupaten Jember	Sedang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
8	Kabupaten Jombang	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
9	Kabupaten Kediri	Baik	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> </ul>
10	Kabupaten Lamongan	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> </ul>
11	Kabupaten Lumajang	Sedang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
12	Kabupaten Madiun	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
13	Kabupaten Magetan	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
14	Kabupaten Malang	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
15	Kabupaten Mojokerto	Sedang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
16	Kabupaten Nganjuk	Baik	
17	Kabupaten Ngawi	Baik	<ul><li>Menguatkan kompetensi pengelola pengadua</li><li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li></ul>

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
18	Kabupaten Pacitan	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> </ul>
19	Kabupaten Pamekasan	Sedang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengadua</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
20	Kabupaten Pasuruan	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
21	Kabupaten Ponorogo	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> </ul>

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
22	Kabupaten Probolinggo	Sedang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
23	Kabupaten Sampang	Sedang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
24	Kabupaten Sidoarjo	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> </ul>
25	Kabupaten Situbondo	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
26	Kabupaten Sumenep	- TIDAK DI	INILAI

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
27	Kabupaten Trenggalek	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
28	Kabupaten Tuban	Baik	<ul> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> </ul>
29	Kabupaten Tulungagung	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
30	Kota Batu	Sedang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
31	Kota Blitar	Baik	<ul> <li>Memanfaatkan data</li> <li>pengaduan dalam</li> <li>meningkatkan layanan publik</li> </ul>
32	Kota Kediri	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
33	Kota Madiun	Baik	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> </ul>
34	Kota Malang	Sangat Baik	
35	Kota Mojokerto	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> </ul>
36	Kota Pasuruan	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
37	Kota Probolinggo	Baik	<ul> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> </ul>
38	Kota Surabaya	Baik	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> </ul>

### 15) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
1	Kabupaten Bantul	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
2	Kabupaten Gunungkidul	Baik	-
3	Kabupaten Kulon Progo	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
4	Kabupaten Sleman	Baik	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> </ul>
5	Kota Yogyakarta	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> </ul>

#### 16) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
1	Kabupaten Badung	Sedang	- Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan
2	Kabupaten Bangli	Sedang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> </ul>
3	Kabupaten Buleleng	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> </ul>
4	Kabupaten Gianyar	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
5	Kabupaten Jembrana	Kurang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
6	Kabupaten Karangasem	Kurang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
7	Kabupaten Klungkung	Sedang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
8	Kabupaten Tabanan	Kurang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
9	Kota Denpasar	Sedang	<ul> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> </ul>

## 17) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
1	Kabupaten Bima	TIDAK DINILAI	
2	Kabupaten Dompu		TIDAK DINILAI
3	Kabupaten Lombok Barat	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
4	Kabupaten Lombok Tengah	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen</li> <li>pimpinan dalam pengelolaan</li> <li>pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi</li> <li>pengelolaan pengaduan</li> </ul>
5	Kabupaten Lombok Timur	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> <li>Meningkatkan kinerja pengelola pengaduan</li> </ul>
6	Kabupaten Lombok Utara		TIDAK DINILAI
7	Kabupaten Sumbawa	Kurang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> <li>Meningkatkan kinerja pengelola pengaduan</li> </ul>

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
8	Kabupaten Sumbawa Barat	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
9	Kota Bima		TIDAK DINILAI
10	Kota Mataram	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>

## 18) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No.	Pemeri <mark>ntah Daera</mark> h	Predikat	Rekomendasi	
1	Kabupaten Alor	TIDAK DINILAI		
2	Kabupaten Belu	TIDAK DINILAI		
3	Kabupaten Ende		TIDAK DINILAI	
4	Kabupaten Flores Timur		TIDAK DINILAI	
5	Kabupaten Kupang		TIDAK DINILAI	
6	Kabupaten Lembata		TIDAK DINILAI	
7	Kabupaten Malaka		TIDAK DINILAI	
8	Kabupaten Manggarai		TIDAK DINILAI	
9	Kabupaten Manggarai Barat		TIDAK DINILAI	
10	Kabupaten Manggarai Timur		TIDAK DINILAI	
11	Kabupaten Ngada		TIDAK DINILAI	
12	Kabupaten Nagekeo		TIDAK DINILAI	
13	Kabupaten Rote Ndao	Kurang	pimpinan dalam pengelolaan pengaduan  - Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan  - Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan  - Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik  - Meningkatkan kinerja pengelola pengaduan	
14	Kabupaten Sabu Raijua		TIDAK DINILAI	
15	Kabupaten Sikka		TIDAK DINILAI	
16	Kabupaten Sumba Barat		TIDAK DINILAI	
17	Kabupaten Sumba Barat Daya		TIDAK DINILAI	
18	Kabupaten Sumba Tengah		TIDAK DINILAI	
19	Kabupaten Sumba Timur	TIDAK DINILAI		
20	Kabupaten Timor Tengah Selatan		TIDAK DINILAI	
21	Kabupaten Timor Tengah Utara		TIDAK DINILAI	
22	Kota Kupang	TIDAK DINILAI		

#### 19) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
1	Kabupaten Bengkayang	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan kinerja pengelolaan pengaduan</li> </ul>
2	Kabupaten Kapuas Hulu	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
3	Kabupaten Kayong Utara		TIDAK DINILAI
4	Kabupaten Ketapang	Baik	<ul><li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li><li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li></ul>
5	Kabupaten Kubu Raya	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
6	Kabupaten Landak		TIDAK DINILAI
7	Kabupaten Melawi		TIDAK DINILAI

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
8	Kabupaten Mempawah	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> <li>Meningkatkan kinerja pengelolaan pengaduan</li> </ul>
9	Kabupaten Sambas		TIDAK DINILAI
10	Kabupaten Sanggau		TIDAK DINILAI
11	Kabupaten Sekadau	Sedang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> </ul>
12	Kabupaten Sintang	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> </ul>
13	Kota Pontianak	Baik	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> </ul>
14	Kota Singkawang		TIDAK DINILAI

#### 20) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
1	Kabupaten Balangan	Baik	<ul> <li>Meningkatkan komitmen         pimpinan dalam pengelolaan         pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data         pengaduan dalam         meningkatkan layanan publik</li> </ul>
2	Kabupaten Banjar	Sedang	<ul> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
3	Kabupaten Barito Kuala	Baik	
4	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Sangat Baik	
5	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Baik	
6	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
7	Kabupaten Kotabaru	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
8	Kabupaten Tabalong	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan kinerja pengelolaan pengaduan</li> </ul>
9	Kabupaten Tanah Bumbu	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
10	Kabupaten Tanah Laut	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
11	Kabupaten Tapin	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
12	Kota Banjarbaru	Baik	
13	Kota Banjarmasin	Baik	

#### 21) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
1	Kabupaten Barito Selatan	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> <li>Meningkatkan kinerja pengelolaan pengaduan</li> </ul>
2	Kabupaten Barito Timur		TIDAK DINILAI
3	Kabupaten Barito Utara	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
4	Kabupaten Gunung Mas	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> </ul>
5	Kabupaten Kapuas	Baik	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> </ul>
6	Kabupaten Katingan	Baik	<ul> <li>Menguatkan kompetensi         pengelola pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data         pengaduan dalam         meningkatkan layanan publik</li> </ul>

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
7	Kabupaten Kotawaringin Barat	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
8	Kabupaten Kotawaringin Timur		TIDAK DINILAI
9	Kabupaten Lamandau	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> <li>Meningkatkan kinerja pengelolaan pengaduan</li> </ul>
10	Kabupaten Murung Raya	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
11	Kabupaten Pulang Pisau	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> <li>Meningkatkan kinerja pengelolaan pengaduan</li> </ul>

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
12	Kabupaten Sukamara	Sedang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
13	Kabupaten Seruyan	Baik	<ul> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
14	Kota Palangka Raya	Sangat Baik	

# 22) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
1	Kabupaten Berau	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> <li>Meningkatkan kinerja pengelolaan pengaduan</li> </ul>
2	Kabupaten Kutai Barat	Baik	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> </ul>
3	Kabupaten Kutai Kartanegara	Baik	<ul> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
4	Kabupaten Kutai Timur	Baik	
5	Kabupaten Mahakam Ulu		TIDAK DINILAI
6	Kabupaten Paser	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> </ul>
7	Kabupaten Penajam Paser Utara	Baik	<ul> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
8	Kota Balikpapan	Baik	
9	Kota Bontang	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
	Kota Samarinda	Baik	1

#### 23) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
1	Kabupaten Bulungan	Kurang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
2	Kabupaten Malinau		TIDAK DINILAI
3	Kabupaten Nunukan	Kurang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> <li>Meningkatkan kinerja pengelolaan pengaduan</li> </ul>
4	Kabupaten Tana Tidung	Sedang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
5	Kota Tarakan	Baik	gg

## 24) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI GORONTALO

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi	
1	Kabupaten Boalemo		TIDAK DINILAI	
2	Kabupaten Bone Bolango	TIDAK DINILAI		
3	Kabupaten Gorontalo	TIDAK DINILAI		
4	Kabupaten Gorontalo Utara	TIDAK DINILAI		
5	Kabupaten Pohuwato	TIDAK DINILAI		
6	Kota Gorontalo	TIDAK DINILAI		

### 25) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
1	Kabupaten Bantaeng	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
2	Kabupaten Barru	Baik	<ul> <li>Memperkuat diseminasi</li> <li>pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data</li> <li>pengaduan dalam</li> <li>meningkatkan layanan publik</li> </ul>
3	Kabupaten Bone	Sedang	<ul> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
4	Kabupaten Bulukumba	Baik	<ul> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> </ul>
5	Kabupaten Enrekang	Kurang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> <li>Meningkatkan kinerja pengelola pengaduan</li> </ul>
6	Kabupaten Gowa	Baik	, ,
7	Kabupaten Jeneponto	Baik	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> </ul>

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
8	Kabupaten Kepulauan Selayar	Baik	<ul> <li>Memperkuat diseminasi</li> <li>pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data</li> <li>pengaduan dalam</li> <li>meningkatkan layanan publik</li> </ul>
9	Kabupaten Luwu	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
10	Kabupaten Luwu Timur	Kurang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
11	Kabupaten Luwu Utara	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
12	Kabupaten Maros	Baik	
13	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Baik	- Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan
14	Kabupaten Pinrang	Baik	- Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
15	Kabupaten Sidenreng Rappang	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen         pimpinan dalam pengelolaan         pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi         pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi         pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data         pengaduan dalam         meningkatkan layanan publik</li> </ul>
16	Kabupaten Sinjai	Baik	- Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik
17	Kabupaten Soppeng	Kurang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> <li>Meningkatkan kinerja pengelola pengaduan</li> </ul>
18	Kabupaten Takalar	Kurang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> <li>Meningkatkan kinerja pengelola pengaduan</li> </ul>

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
19	Kabupaten Tana Toraja	Kurang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> <li>Meningkatkan kinerja pengelola pengaduan</li> </ul>
20	Kabupaten Toraja Utara	Sedang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
21	Kabupaten Wajo	Baik	<ul> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> </ul>
22	Kota Makassar	Baik	<ul> <li>Memperkuat diseminasi</li> <li>pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data</li> <li>pengaduan dalam</li> <li>meningkatkan layanan publik</li> </ul>
23	Kota Palopo	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen         pimpinan dalam pengelolaan         pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi         pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi         pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data         pengaduan dalam         meningkatkan layanan publik</li> </ul>

No. Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
24 Kota Parepare	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>

# 26) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
1	Kabupaten Bombana	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan kinerja pengelola pengaduan</li> </ul>
2	Kabupaten Buton		TIDAK DINILAI
3	Kabupaten Buton Selatan		TIDAK DINILAI
4	Kabupaten Buton Tengah		TIDAK DINILAI
5	Kabupaten Buton Utara		TIDAK DINILAI
6	Kabupaten Kolaka		TIDAK DINILAI
7	Kabupaten Kolaka Timur		TIDAK DINILAI
8	Kabupaten Kolaka Utara		TIDAK DINILAI
9	Kabupaten Konawe	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
10	Kabupaten Konawe Kepulauan	TIDAK DINILAI	
11	Kabupaten Konawe Selatan		TIDAK DINILAI
12	Kabupaten Konawe Utara		TIDAK DINILAI
13	Kabupaten Muna		TIDAK DINILAI
14	Kabupaten Muna Barat		TIDAK DINILAI
15	Kabupaten Wakatobi	Kurang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> <li>Meningkatkan kinerja pengelola pengaduan</li> </ul>

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
16	Kota Bau-Bau	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
17	Kota Kendari	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>

#### 27) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
1	Kabupaten Banggai	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	TIDAK DINILAI
2	Kabupaten Banggai Kepulauan	TIDAK DINILAI	
3	Kabupaten Banggai Laut		TIDAK DINILAI
4	Kabupaten Buol		TIDAK DINILAI
5	Kabupaten Donggala		TIDAK DINILAI
6	Kabupaten Morowali		TIDAK DINILAI
7	Kabupaten Morowali Utara	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
8	Kabupaten Parigi Moutong	Kurang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduanMemperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>
9	Kabupaten Poso	TIDAK DINILAI	
10	Kabupaten Sigi		TIDAK DINILAI
11	Kabupaten Tojo Una-Una		TIDAK DINILAI
12	Kabupaten Toli-Toli		TIDAK DINILAI
13	Kota Palu		TIDAK DINILAI

## 28) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
1	Kabupaten Bolaang Mongondow	TI	DAK DINILAI
2	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	ТІ	DAK DINILAI
3	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	ТІ	DAK DINILAI
4	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	ті	DAK DINILAI
5	Kabupaten Kepulauan Sangihe	TI	DAK DINILAI
6	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Tı	DAK DINILAI
7	Kabupaten Kepulauan Talaud	TI	DAK DINILAI
8	Kabupaten Minahasa	TI	DAK DINILAI
9	Kabupaten Minahasa Selatan	Т	DAK DINILAI
10	Kabupaten Minahasa Tenggara	TI	DAK DINILAI
11	Kabupaten Minahasa Utara	Ti	DAK DINILAI
12	Kota Bitung	Т	DAK DINILAI
13	Kota Kotamobagu	T	DAK DINILAI
14	Kota Manado	T	DAK DINILAI
15	Kota Tomohon	Т	IDAK DINILAI

## 29) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI BARAT

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi	
1	Kabupaten Majene	TIDAK DINILAI		
2	Kabupaten Mamasa	TIDAK DINILAI		
3	Kabupaten Mamuju	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>	
4	Kabupaten Mamuju Tengah		TIDAK DINILAI	
5	Kabupaten Pasangkayu	Sedang	<ul> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> <li>Meningkatkan kinerja pengelola pengaduan</li> </ul>	
6	Kabupaten Polewali Mandar	Sedang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> </ul>	

#### 30) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi	
1	Kabupaten Buru	TIDAK DINILAI		
2	Kabupaten Buru Selatan		TIDAK DINILAI	
3	Kabupaten Kepulauan Aru		TIDAK DINILAI	
4	Kabupaten Maluku Barat Daya	TIDAK DINILAI		
5	Kabupaten Maluku Tengah	TIDAK DINILAI		
6	Kabupaten Maluku Tenggara	TIDAK DINILAI		
7	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	TIDAK DINILAI		
8	Kabupaten Seram Bagian Barat		TIDAK DINILAI	
9	Kabupaten Seram Bagian Timur	TIDAK DINILAI		
10	Kota Ambon	TIDAK DINILAI		
11	Kota Tual	TIDAK DINILAI		

#### 31) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU UTARA

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi	
1	Kabupaten Halmahera Barat	TIDAK DINILAI		
2	Kabupaten Halmahera Tengah		TIDAK DINILAI	
3	Kabupaten Halmahera Utara		TIDAK DINILAI	
4	Kabupaten Halmahera Selatan	TIDAK DINILAI		
5	Kabupaten Kepulauan Sula	TIDAK DINILAI		
6	Kabupaten Halmahera Timur	TIDAK DINILAI		
7	Kabupaten Pulau Morotai	TIDAK DINILAI		
8	Kabupaten Pulau Taliabu	TIDAK DINILAI		
9	Kota Ternate	TIDAK DINILAI		
10	Kota Tidore Kepulauan	TIDAK DINILAI		

#### 32) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi	
1	Kabupaten Biak Numfor	TIDAK DINILAI		
2	Kabupaten Jayapura		TIDAK DINILAI	
3	Kabupaten Keerom		TIDAK DINILAI	
4	Kabupaten Kepulauan Yapen	TIDAK DINILAI		
5	Kabupaten Mamberamo Raya	TIDAK DINILAI		
6	Kabupaten Sarmi	TIDAK DINILAI		
7	Kabupaten Supiori	TIDAK DINILAI		
8	Kabupaten Waropen	TIDAK DINILAI		
9	Kota Jayapura	TIDAK DINILAI		

## 33) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA BARAT

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi	
1	Kabupaten Fakfak		TIDAK DINILAI	
2	Kabupaten Kaimana	TIDAK DINILAI		
3	Kabupaten Manokwari	TIDAK DINILAI		
4	Kabupaten Manokwari Selatan	TIDAK DINILAI		
5	Kabupaten Pegunungan Arfak	TIDAK DINILAI		
6	Kabupaten Teluk Bintuni	TIDAK DINILAI		
7	Kabupaten Teluk Wondama	TIDAK DINILAI		

## 34) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA SELATAN

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
1	Kabupaten Asmat	TIDAK DINILAI	
2	Kabupaten Boven Digoel	TIDAK DINILAI	
3	Kabupaten Mappi	TIDAK DINILAI	
4	Kabupaten Merauke	TIDAK DINILAI	

## 35) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA TENGAH

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
1	Kabupaten Deiyai	TIDAK DINILAI	
2	Kabupaten Dogiyai	TIDAK DINILAI	
3	Kabupaten Intan Jaya	TIDAK DINILAI	
4	Kabupaten Mimika	TIDAK DINILAI	
5	Kabupaten Nabire	TIDAK DINILAI	
6	Kabupaten Paniai	TIDAK DINILAI	
7	Kabupaten Puncak	TIDAK DINILAI	
8	Kabupaten Puncak Jaya	TIDAK DINILAI	

## 36) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
1	Kabupaten Jayawijaya	TIDAK DINILAI	
2	Kabupaten Lanny Jaya	TIDAK DINILAI	
3	Kabupaten Mamberamo Tengah	TIDAK DINILAI	
4	Kabupaten Nduga	TIDAK DINILAI	
5	Kabupaten Pegunungan Bintang	TIDAK DINILAI	
6	Kabupaten Tolikara	TIDAK DINILAI	
7	Kabupaten Yahukimo	TIDAK DINILAI	
8	Kabupaten Yalimo	TIDAK DINILAI	

# 37) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

No.	Pemerintah Daerah	Predikat	Rekomendasi
1	Kabupaten Maybrat	TIDAK DINILAI TIDAK DINILAI	
2	Kabupaten Raja Ampat		
3	Kabupaten Sorong	Kurang	<ul> <li>Memperkuat manajemen kebijakan pengelolaan pengaduan</li> <li>Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan pengaduan</li> <li>Menguatkan kompetensi pengelola pengaduan</li> <li>Memperkuat diseminasi pengelolaan pengaduan</li> <li>Memanfaatkan data pengaduan dalam meningkatkan layanan publik</li> <li>Meningkatkan kinerja pengelolaan pengaduan</li> </ul>
4	Kabupaten Sorong Selatan		TIDAK DINILAI
5	Kabupaten Tambrauw		TIDAK DINILAI
6	Kota Sorong		TIDAK DINILAI

Menteri palam Neperi,

Muhammad Tito Karnavian